

**PARTISIPASI KELOMPOK TANI HUTAN PADA
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI
HUTAN BANGKENG BUKIT DESA BUKIT
HARAPAN KECAMATAN GANTARANG
KAB. BULUKUMBA**

Oleh :

A. INAYATUL HIDAYAH

M111 16 513



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Partisipasi Kelompok Tani Hutan Pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Sangkang Bukit, Desa Bukit Harapan, Kec. Gunturong, Kab. Bulukumba
Nama Mahasiswa : A.Inayatul Hidayah
Stambuk : M111 16 513

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

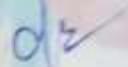
Menyetujui :

Komisi Pembimbing

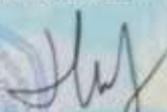
Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Dassir, M.Si
NIP. 19671005 199103 1 006


Ir. Adravanti Sabar, S.Hut.M.P.,JPM
NIK. 19850916 201807 4 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


Dr. Forest Muh. Abf K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Lulus : 6 November 2020

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.Inayatul Hidayah
NIM : M1111 6 513
Prodi : Kehutanan
Judul Skripsi :Partisipasi Kelompok Tani Hutan Pada Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan di Hutan Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan,
Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
Fakultas : Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulisan saya sendiri, baik dari naskah laporan maupun data-data yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat data karya tulis orang lain saya akan mencantumkan sumber dengan jelas

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan seta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin Makassar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa adanya pemaksaan dari siapapun.

Makassar, 01 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



A.Inayatul Hidayah

ABSTRAK

A.Inayatul Hidayah (M1111 16 513). Partisipasi Kelompok Tani Hutan Pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Di bawah bimbingan Muhammad Dassir dan Adrayanti Sabar.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm Bangkeng Bukit telah mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Salah satu Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di kawasan hutan Bangkeng Bukit, yakni KTH Buhung Lali. KTH Buhung Lali terbentuk sejak tahun 2008 dengan luas lahan kelola sekitar 78,78 hektar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi Kelompok Tani Hutan pada pengelolaan HKm di Hutan Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba. Populasi penelitian ini adalah Kelompok Tani Hutan Buhung Lali. sampel diambil secara sensus yaitu seluruh anggota yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Buhung Lali 49 orang termasuk jajaran pengurus Kelompok Tani Hutan (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi KTH Buhung Lali pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Bangkeng Bukit pada masing masing tahapan pengelolaan HKm berbeda-beda. Partisipasi masyarakat tinggi pada tahapan perencanaan dan tahap pelaksanaan sedangkan partisipasi masyarakat rendah pada tahap monitoring dan evaluasi. Bentuk partisipasi KTH Buhung Lali pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Bangkeng Bukit pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan tergolong partisipasi fungsional – interaktif – self mobilisasi, sedangkan pada tahap monitoring dan evaluasi tergolong partisipasi manipulatif – pasif.

Kata Kunci : Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Tani Hutan, Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. atas segala limpahan kenikmatan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Partisipasi Kelompok Tani Hutan Pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba”**. Salam dan shalawat juga penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* yang telah membawa ummat Islam di jalan kebenaran hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak duduk dibangku perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini secara khusus dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada **Prof. Dr .Ir. Muhammad Dassir, M. Si** dan **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., M.P., IPM** selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tiada hentinya dan segala bentuk hormat penulis kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Andi Amiruddin** dan ibunda **Nurwahidah Arsyad S.Sos** serta atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang, kerja keras, motivasi, semangat, saran dan didikannya dalam membesarkan penulis, serta saudara tersayang Kakak **Andi Achmad Hidayat, S.Pd** dan Adik **Andi Usril Hidayat** atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Yusran, S.Hut., M.Si** dan Ibu **Makkarenu, S.Hut.M.Si.Ph.D** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan skripsi ini.

2. Bapak alm. **Dr. Ir. M. Asar Said Mahbub, M.P.**, Saudari **Andi Mawaddah Zakiyah Ridjal, S.Hut** dan Kakak **Sri Wahyuni Mushar**, Kakak **Ardian Halis** yang telah memberikan ilmu dan arahan selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
3. Ibu **Makkarenu, S.Hut.M.Si.Ph.D** selaku Pembimbing Akademik atas segala nasehat yang telah diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. Kepala Desa, Kelompok Tani Hutan Buhung Lali terkhusus ketua KTH Bapak **Thamrin** dan seluruh masyarakat di Desa Bukit Harapan HKm Bangkeng Bukit atas segala bantuan dan informasi yang diberikan selama berada di lokasi penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman dan keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhusus **Andi Mawaddah Zakiyah R, Yeni Ayu Lestari, Ainun Dwi Sartika, Basran Nur Basir, Febrianti Irna, Nuraena, Iis Lestari, Rezky Yulia Ningsih Rauf, Andi Lilis Suriani Mappiaban** yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat saya tercinta, **Sri Novita Sari, Andi Aulia Nurazizah, Andi Nurul Fadilah, Nadya Oktaviani B, Fathin Furaida, Nisa Andini, Siti Nurchalifah Adinda Putri, Nurul Mutia, Nurzakirah Amir, Pratiwi Shirtya Saputra, Ismayuni, Inda Rahmadani, Melisa Putri, Riskayanti** yang telah berkontribusi besar dengan segala semangat, dukungan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada teman-teman **Sisters Sam Suriyani, Fahira Nurul Amalia, Annisa Larasati Alifa Putri, Ainun Zalsabila, Andi Rugaiyah Putri, Arsyillah Mughni Rahmi, Rifa'atul Mahmudah, Fitriani Syam, Zhaumi Ramadhani Irwan, Tri Aprilia Khaerunnisa, Tri Alma Putri, Reisha Febianti S**, yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi dan memberi dukungan selama ini kepada penulis.

9. Terima Kasih kepada teman-teman **Nurauliatul Qumaini Nasrah, Ismiah Mutmainnah, Rian Adrian, Didit Taufiq, Syahru Ramadhan Arif, Meta Dilianti Palimbunga, Syahrina Mustamin, Mutia Kamaruddin, Afarni Mulia Ningsih** yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi dan memberi dukungan selama ini kepada penulis.
10. Keluarga besar **L16NUM** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, 30 November 2020

Andi Inayatul Hidayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Hutan Kemasyarakatan	4
2.2 Pengelolaan HKm	5
2.3 Kelompok Tani Hutan (KTH).....	6
2.4 Partisipasi	7
2.5 Klasifikasi/Jenis-jenis Partisipasi	9
2.6 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan HKm	10
III. METODE PENELITIAN.....	11
3.1 Waktu dan Tempat	11
3.2 Populasi dan Sampel	12
3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	12
3.4 Analisis Data	13
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Keadaan Umum Areal Hutan Kemasyarakatan Bangkeng Bukit.....	16
4.2 Profil Kelompok Tani Hutan	16
4.2.1 Umur	17
4.2.2 Tingkat Pendidikan.....	18
4.2.3 Penghasilan Responden.....	19

4.3	Aktivitas Kelompok Tani Hutan Pada Pengelolaan HKm	20
4.3.1	Kegiatan Tahap Perencanaan.....	20
4.3.2	Kegiatan Tahap Pelaksanaan.....	22
4.3.3	Kegiatan Tahap Monitoring dan Evaluasi.....	24
4.4	Bentuk Partisipasi Kelompok Tani Hutan Pada Pengelolaan HKm.....	25
4.4.1	Partisipasi Tahap Perencanaan.....	25
4.4.2	Partisipasi Tahap Pelaksanaan.....	27
4.4.3	Partisipasi Tahap Monitoring dan Evaluasi.....	28
4.5	Klasifikasi Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Pada Pengelolaan HKm	29
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	32
5.1.	Kesimpulan	32
5.2.	Saran	32
	DAFTAR PUSTAKA	33
	LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan dalam Pengelolaan HKm	13
Tabel 2.	Klasifikasi Umur Kelompok Tani Hutan Buhung Lali	17
Tabel 3.	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Kelompok Tani Hutan Buhung Lali.....	18
Tabel 4.	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Kelompok Tani Hutan Buhung Lali.....	20
Tabel 5.	Aktivitas Kelompok Tani dalam Kegiatan Perencanaan	22
Tabel 6.	Aktivitas Kelompok Tani Hutan Buhung Lali Pada Tahap Pelaksanaan	22
Tabel 7.	Aktivitas Kelompok Tani Hutan pada Kegiatan Monitoring Evaluasi ...	25
Tabel 8.	Klasifikasi Tingkat Partisipasi Untuk Kegiatan Perencanaan.....	25
Tabel 9.	Klasifikasi Tingkat Partisipasi Untuk Kegiatan Pelaksanaan	28
Tabel 10.	Klasifikasi Tingkat Partisipasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	29
Tabel 11.	Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan dalam Pengelolaan HKm ...	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Kerangka Pemikiran Penelitian	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuisisioner dan Panduan Wawancara Penelitian	37
Lampiran 2.	Tabulasi Data Tingkat Partisipasi KTH Buhung Lali	40
Lampiran 3.	Data Identitas Responden Kelompok Tani Hutan Buhung Lali	42
Lampiran 4.	Skoring Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan HKm..	44
Lampiran 5.	Skoring tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan HKm.....	47
Lampiran 6.	Skoring tingkat partisipasi masyarakat pada Pemanfaatan, Monitoring dan Evaluasi Hutan Kemasyarakatan	49
Lampiran 7.	Klasifikasi Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Hutan Pada Pengelolaan Hkm	51
Lampiran 8.	Rencana Umum Hutan Kemasyarakatan KTH Buhung Lali	53
Lampiran 9.	Rencana Operasional Hutan Kemasyarakatan Bangkeng Bukit	54
Lampiran 10.	Susunan Pengurus Kelompok Tani Hutan Buhung Lali	55
Lampiran 11.	Wawancara dengan Kelompok Tani Hutan Buhung Lali	56
Lampiran 12.	Papan Lokasi Sekretariat Kelompok Tani Hutan Buhung Lali	57
Lampiran 13.	Struktur Kelompok Tani Hutan Buhung Lali)	57
Lampiran 14.	Dokumentasi foto bersama ketua Kelompok Tani Hutan Buhung Lali (Bapak Thamrin)	58
Lampiran 15.	Wawancara masyarakat di lokasi HKm Bangkeng Bukit.....	58

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan hutan yang mampu mengakomodir kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar hutan dapat diterapkan menjadi Konsep Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) (Mirna, 2019). Salah satu bentuk pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016 tentang perhutanan sosial menjelaskan bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK) Nomor SK.363/Menhut-II/2011 menetapkan areal hutan kemasyarakatan yang telah mendapatkan izin pencadangan seluas 2.265 Ha. Lebih dari separuh lahan tersebut telah mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. SK Pemerintah tersebut telah memberikan IUPHKm kepada 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan hutan Anrang seluas 655 Ha terdiri dari 7 KTH, kawasan hutan Lompobattang seluas 390 Ha terdiri dari 4 KTH serta kawasan hutan Bangkeng Bukit seluas 245 Ha yang terdiri dari 3 Kelompok Tani Hutan (KTH).

KTH yang berada di kawasan hutan Bangkeng Bukit, yakni KTH Buhung Lali, KTH Bukit Indah, dan KTH Mattiro Bulu. Hal ini diperjelas oleh penelitian Mirna (2018) yang menjelaskan bahwa pada tahun 2012 terbit keputusan Bupati Bulukumba Nomor SK 533/XII/2012 tentang pemberian IUPHKm kepada beberapa Kelompok Tani Hutan. Berdasarkan SK kementerian Kehutanan dan SK IUPHKM Bupati kabupaten Bulukumba, pengguna lokal (masyarakat yang tinggal di dalam hutan ataupun yang berada di sekitar hutan) dapat mengakses sumber daya hutan secara legal dan dapat menikmati hasil serta akses yang dapat digunakan dari pengelolaan sumber daya hutan.

Salah satu Kelompok Tani Hutan yang berada di kawasan hutan Bangkeng Bukit, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba adalah KTH Buhung Lali.

KTH Buhung Lali terbentuk sejak tahun 2008 dengan luas lahan kelola sekitar 78,78 hektar. Kawasan hutan ini masyarakat melakukan pembibitan dan menanam berbagai macam jenis tanaman seperti kemiri, aren dan kakao. Warga juga mengelola madu hutan dan juga pembuatan gula aren.

Suprayitno (2011) mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan tergolong rendah dikarenakan rendahnya tingkat keberdayaan dan kurang optimalnya tingkat kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sebagian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program, serta kurang terlaksananya rapat atau pertemuan yang rutin mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, sehingga masyarakat menjadi kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan program secara keseluruhan. Menurut Suprayitno (2008) pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dalam rangka pelestarian dan pengelolaan hutan merupakan hal mendasar untuk mengembangkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat pengelola hutan.

Sagita (2019) pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu modal sosial yang dikembangkan secara integratif melalui berbagai kegiatan pengelolaan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan.

Oleh karena itu konsep partisipasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana petani hutan kemasyarakatan terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, seberapa tinggi keterlibatannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat partisipasi masyarakat dapat tercermin dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Tahapan pengelolaan terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan monitoring. Partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga (Sagita, 2019). Partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan kemasyarakatan merupakan faktor

yang mendukung keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan sehingga dapat berkembang secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat partisipasi Kelompok Tani Hutan pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat partisipasi Kelompok Tani Hutan pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Hutan Bangkeng Bukit, Desa Bukit Harapan, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada masyarakat dan bagi pihak yang menjalankan program KTH dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberiannya akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan memberdayakan masyarakat (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), tanpa mengganggu fungsi pokoknya (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan (Cahyaningsih, 2006).

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk perhutanan sosial (*social forestry*), umumnya *social forestry* digunakan sebagai istilah payung yang mencakup program-program dan kegiatan kehutanan yang sedikit atau banyak melibatkan peranan masyarakat atau rakyat lokal, atau yang dikembangkan untuk kepentingan masyarakat banyak (Suhardjito, 2000).

Waznah (2006), ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan yaitu:

- a. Bagi masyarakat, HKm dapat: (1) memberikan kepastian akses untuk turut mengelola hutan, (2) menjadi sumber mata pencarian, (3) ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumahtangga dan pertanian terjaga, dan (4) hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya.

- b. Bagi pemerintah, HKm dapat: (1) sumbangan tidak langsung bagi masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana, dan (2) kegiatan HKm berdampak kepada pengamatan hutan.
- c. Bagi fungsi hutan restorasi habitat (1) terbentuknya keanekaragaman tanaman, (2) terjaganya fungsi ekologi dan hidrologis, melalui pola tanaman campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan, dan (3) menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.

2.2 Pengelolaan HKm

Pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah salah satu prinsip pengelolaan hutan yang seharusnya memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan atau berbasis pada hutan. Ada berbagai macam tafsiran mengenai pengertian berbasis masyarakat. Sebagian pihak mengatakan hak, kedaulatan dan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan menyangkut masyarakat. Keterlibatan, peran serta atau kebersamaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang juga harus diperhatikan di samping kebutuhan dan kesejahteraan mengelola hutan bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk yakni dengan memberi bantuan, mobilisasi atau menggerakkan masyarakat, instruksi, membayar masyarakat sebagai tenaga kerja, bagi hasil, bahkan eksploitasi masyarakat atau benarbenar sebagai mitra yang sejajar dalam setiap pengambilan keputusan, perencanaan dan implementasinya (Djogo, 2004).

Perum Perhutani (2000) mengemukakan bahwa perhutanan sosial diberi pengertian sebagai program pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola hutan, dengan tujuan meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga kelestariannya. Pengertian perhutanan sosial tersebut lebih menekankan sebagai program bukan sebagai sistem pengelolaan hutan oleh karena itu pada awal pengembangannya oleh perhutani program perhutanan sosial meliputi kegiatan di dalam kawasan hutan, yaitu pengembangan agroforestri dan di luar kawasan hutan, yaitu pengembangan kelompok tani hutan (KTH) dan usaha produktif lainnya.

Pengelolaan hutan partisipatif dapat diwujudkan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Menurut Keputusan Direksi Perum Perhutani No : 682/KPTS/DIR/2009 pengertian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. PHBM dilaksanakan dengan prinsip diantaranya: Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah; Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama; Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program pemerintah daerah; Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas; Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan; Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan. PHBM diharapkan mampu memberikan hasil yang saling menguntungkan dari pihak pihak terkait secara langsung. Dalam hal ini masyarakat desa di sekitar hutan yang menjadi peserta PHBM, pengelola kawasan dan pihak lain yang akan terlibat dalam modal kerja bagi petani dan pemasaran hasilnya.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu usaha dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Menurut Najiyati (2005) pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif.

2.3 Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kelompok tani hutan (KTH) sebagai bagian dari masyarakat, selain sebagai sasaran utama penyuluhan kehutanan saat ini menjadi pelaku utama pembangunan kehutanan di tingkat bawah. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta

keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan baik di hilir maupun di hulu (Kemenhut, 2014). Beberapa kegiatan pembangunan kehutanan, telah melibatkan kelompok tani hutan sebagai pelaku utama adalah Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Tanaman Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, KTH yang berusaha di bidang kehutanan seperti pembibitan, budidaya lebah madu, jamur tiram, ulat sutra, *agroforestry/silvopasture/silvofishery* dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Kelompok tani adalah salah satu bentuk organisasi yang di dalamnya termuat aturan-aturan yang disepakati oleh para anggotanya. Pembentukan kelompok tani merupakan salah satu upaya mengkoordinasikan individu-individu untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan (Sukdan, 2004).

2.4 Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010). Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*Bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Sugiyah (2006) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan keterlibatannya, yaitu:

a) Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b) Partisipasi tidak langsung .

Pengertian partisipasi yang lain menurut Syafie (2001) adalah partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Astuti (2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama, wujud dari partisipasi dalam pengambilan keputusan ini ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat atau diskusi dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas, dari segi kualitas dapat dilihat dari output sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Partisipasi secara individu atau kelompok dalam program kegiatan penyuluhan kehutanan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penyuluhan tersebut. Kelompok masyarakat sebagai sasaran penyuluhan akan terjadi hubungan sebab akibat antar individu didalamnya akan saling mempengaruhi yang disebut dengan dinamika kelompok.

2.5 Klasifikasi/ Jenis-Jenis Partisipasi

Sekretariat Bina Desa (2000) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan *self mobilization*. Seperti dijelaskan dibawah ini :

1. Partisipasi pasif/manipulatif, masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi melalui konsultasi, masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4. Partisipasi untuk insentif materiil, masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5. Partisipasi fungsional, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati;

pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.

6. Partisipasi interaktif, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada; partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
7. *Self mobilization*, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

2.6 Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan HKm

Astuti (2009), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Kegiatan penanaman tanaman karet merupakan kegiatan partisipasi fisik yang tergolong kategori tinggi, karena dari awal kegiatan penanaman sampai selesai sebagian besar responden selalu ikut serta menanam tanaman karet di lahan yang dimiliki, dengan ikut serta melakukan sebagian besar kegiatan penanaman. Suharjito (2000) bahwa keberagaman pola tanam (struktur dan

komposisi jenis tanaman) hutan rakyat adalah hasil kreasi budaya masyarakat. Secara umum penanaman dalam hutan rakyat diklasifikasikan pada dua pola tanam yaitu murni (*monokultur*) dan campuran (*polyculture*).

Keikutsertaan atau kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan mengenai pengembangan program hutan rakyat tergolong kategori tinggi, karena sebagian besar responden sering menghadiri kegiatan penyuluhan yang difasilitasi oleh kelompok maupun pemerintah mengenai pengembangan program hutan rakyat. Bentuk kegiatan partisipasi fisik yang tergolong kategori tinggi yaitu penyadapan. Penyadapan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh sebagian besar responden, sebagian besar responden melakukan sebagian besar kegiatan penyadapan tanaman karet dari seluruh kebun yang dimiliki.

Partisipasi fisik dengan parameter pemeliharaan yang berupa pemangkasan atau pemotongan cabang pohon yang tidak berguna (tergantung pada tujuan penanaman) yang dilakukan pada tanaman karet pada saat berumur satu tahun sampai dengan dua tahun dalam kegiatan partisipasi fisik memperoleh nilai terendah kategori sedang. Penyebab dari kegiatan pemeliharaan hutan rakyat yang berupa pemangkasan memperoleh nilai terendah, yaitu disebabkan oleh sebagian besar responden melakukan kegiatan pemangkasan dengan tidak rutin, dan pada saat penelitian diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden berdasarkan milik lahan dengan luas lahan yang sempit tidak melakukan kegiatan pemangkasan pada tanaman karet.